

JURNAL

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP  
PDRB SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

CHRISTI STELLA MANOI

090314014

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Ir. Grace A. J. Rumagit, MSi
2. Ir. Joachim N.K. Dumais, ME
3. Dr. Rine Kaunang, SP.,MBA



JURUSAN SOSIAL EKONOMI  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
MANADO

2015

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP  
PDRB SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Christi Stella Manoi / 090314014

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober sampai November 2014 dan menggunakan data sekunder berupa data deret berkala (*time series*) dari tahun 2005 sampai 2013 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi SULUT dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi SULUT. Analisis data menggunakan metode regresi linier sederhana dengan program Minitab *version* 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80,3 persen PDRB sektor pertanian dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dengan taraf nyata sebesar 30 persen, sehingga dapat disimpulkan peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian meningkatkan PDRB sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara.

**ABSTRACT**

The objective of this research is to identify the effect of government expenditure to GRDP of agriculture sector in North Sulawesi Province. This research was conducted from October to November 2014 by using secondary data in form of time series data in 2005-2013 period obtained from North Sulawesi Central Bureau of Statistics and North Sulawesi Province Agriculture and Livestock Department. Analysis of data uses simple linear regression method using Minitab Statistics program version 16.

Research result showed that 80,3 percent of GRDP Agriculture sector was significantly affected by Government expenditure at 30 percent significance level, therefore it can be concluded that the increasing of government expenditure of agriculture sector increase GRDP of agriculture sector in North Sulawesi Province.

## **I. Pendahuluan**

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada dasarnya tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional, salah satu sasaran pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah ialah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Proses produksi melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana prasarana produksi. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di samping analisis pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dapat pula

digunakan untuk menentukan arah pembangunan yang akan datang (Yulianita, 2009).

Sampai sekarang ini sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan pembangunan nasional maupun daerah sehubungan dengan menyediakan pangan bagi sebagian besar penduduknya, memberikan lapangan kerja bagi hampir seluruh angkatan kerja yang ada, menghasilkan bahan mentah, bahan baku atau penolong bagi industri memberikan kontribusi terhadap PDRB, sumber devisa, serta mendorong bergeraknya sektor-sektor riil lainnya. Pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani dan pemerataan pembangunan pedesaan. Pertanian merupakan sektor terbesar dalam hampir setiap ekonomi negara berkembang (Suwanti, 2013).

Sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, struktur perekonomian Sulawesi Utara tidak begitu banyak mengalami pergeseran. Sektor pertanian (20,40 persen) menjadi penyumbang terbesar pada total PDRB berdasarkan harga konstan 2000 pada tahun 2008, diikuti sektor bangunan (16,39 persen) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (15,42 persen). Sampai pada tahun 2012 sektor pertanian masih mejadi penyumbang

terbesar pada total PDRB Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian berperan penting bagi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dukungan pemerintah juga diperlukan guna menopang pembangunan sektor pertanian menjadi lebih baik lagi (Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2013a).

Pada tahun 2008 sektor pertanian menyumbang sebesar Rp 3.243.372 juta dan angka tersebut terus meningkat hingga sebesar Rp 3.780.280 juta pada tahun 2012. Meski nilai PDRB sektor semakin bertambah, tetapi komposisi sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB total semakin menurun. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan tingkat harga setiap tahun. Pada tahun 2007 sektor pertanian menyumbang sebesar 20,40 persen, kemudian semakin menurun menjadi 17,76 persen pada tahun 2012. Sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan, sub sektor perikanan. Dalam penelitian ini yang akan diteliti ialah sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor peternakan.

Target utama program pembangunan pertanian dan peternakan tahun 2010-2015 adalah pencapaian Sulawesi Utara berswasembada beras dan swasembada

pangan berkelanjutan serta mendukung program swasembada daging sapi nasional. Dalam upaya pencapaian Sulawesi Utara berswasembada beras dan mendukung program swasembada daging sapi nasional maka produksi padi dan daging sapi harus ditingkatkan. Peningkatan produksi padi dicapai melalui ketersediaan benih bersertifikat, penambahan luas panen dan peningkatan produktivitas. Sedangkan, peningkatan produksi daging sapi untuk mensubsidi daerah lain sehingga secara langsung berkontribusi terhadap program swasembada daging sapi nasional (Dinas Pertanian dan Peternakan, 2013).

Untuk mewujudkan tercapainya program pembangunan Sulawesi Utara tentu memerlukan pembiayaan pembangunan, yang mana telah terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peningkatan pendanaan pada sektor pertanian merupakan salah satu upaya peningkatan PDRB sektor pertanian. Pendanaan atau sering disebut pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat yang kemudian akan meningkatkan produksi (output). Selain pembiayaan yang bersumber

dari APBD ada juga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di salurkan dari kementrian pertanian ke pemerintah provinsi. Pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara berfungsi dalam pendanaan pelaksanaan program-program yang telah dirancang oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dalam meningkatkan produksi pertanian khususnya melalui program-program yang Pro terhadap petani (Dinas Pertanian dan Peternakan, 2013).

## II. Metodologi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Dinas pertanian dan Peternakan serta Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, selama empat bulan di pada bulan Oktober 2014 hingga Januari 2015.

### Metode Analisis Data

Analisis data penelitian menggunakan metode analisis regresi sederhana dengan program *Minitab 16* dan *Microsoft Excel 2010*. Selanjutnya dilakukan interpretasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB sektor pertanian di Sulawesi Utara.

### Analisis Regresi

Analisis regresi dapat digunakan untuk mengestimasi suatu hubungan antara variabel-variabel dan menggambarkan pengaruh antara variabel, dalam penulisan ini

variabelnya terdiri dari PDRB sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah yaitu APBD dan APBN dengan model regresi sederhana berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i-k} + \mu_i$$

Keterangan :

$Y_i$ = PDRB sektor pertanian;

$X_i$ = Pengeluaran pemerintah;

$\beta_0$ = Konstanta;

$\beta_1$ = Koefisien regresi

$i$ = Tahun;

$k$ = *time lag* (1 tahun);

$\mu$ = *error*.

Dimana  $\beta_0$  dan  $\beta_1$  disebut sebagai parameter dari fungsi regresi tersebut.  $\beta_0$  disebut juga sebagai titik potong (*intercept*) yang menyatakan besarnya nilai Y bilamana X sebesar nol. Sedangkan  $\beta_1$  disebut sebagai kemiringan (*slope*), kemiringan tersebut mengukur tingkat perubahan Y untuk setiap satu unit perubahan X, atau secara lebih umum dapat dikatakan bahwa kemiringan mengukur tingkat perubahan nilai variabel di sisi kiri persamaan (variabel tak bebas) untuk setiap unit perubahan nilai variabel di sisi kanan persamaan (variabel bebas). Koefisien  $\beta_1$  dapat bernilai positif ataupun negatif. Dan  $\mu$  menyatakan faktor kesalahan acak atau secara sederhana disebut gangguan acak. Variabel  $\mu$  mewakili semua faktor selain X yang mempengaruhi Y tetapi tidak

ditunjukkan secara eksplisit didalam model (Gujarati, 2007).

Tingkat signifikansi atau  $\alpha$  yang berkisar  $0 < \alpha < 1$  dan selang kepercayaan atau derajat kepercayaan  $(1-\alpha)$  sebagai penaksir nilai  $\mu$  yang tidak dijelaskan daalam model. Jika  $\alpha = 0,05$  maka selang kepercayaan  $(1 - \alpha) = 0,95$ , dan bila  $\alpha = 0,01$  maka selang kepercayaan 0,99 yang tentu saja lebih panjang. Semakin panjang selang kepercayaan, semakin yakin bahwa selang mencakup parameter yang tidak diketahui atau mencakup nilai  $\mu$  yang sebenarnya. Dalam praktek,  $(1 - \alpha)$  sering dikalikan 100 guna menyatakannya dalam bentuk persen (Gujarati, 2000 ; Walpole, 1995).

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat besarnya persentase variasi (keragaman) variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi bebas dalam model. Nilai koefisien determinasi dipergunakan untuk mengukur besarnya sumbangan atau kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Nilai koefisien determinasi berkisar dari nol sampai satu atau dapat ditulis  $0 \leq R^2 \leq 1$ . Jika  $R^2$  sebesar 1 berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan  $R^2$  yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas. Semakin mendekati satu

maka model dikatakan semakin baik karena menunjukkan semakin tepat atau cocoknya suatu garis regresi serta semakin besar variasi variabel bebas menjelaskan variasi variabel tak bebas (Gujarati, 2000).

### **Koefisien Korelasi (R)**

Koefisien korelasi merupakan suatu ukuran kekuatan hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variable tak bebas. Nilai R dapat menilai positif atau negatif dan berkisar antara  $-1 \leq R \leq 1$ .

Hasil dari koefisien korelasi (R) dapat diartikan sebagai berikut (Yulianita, 2009) :

**Tabel 1. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R**

0,800 – 1,000	Sangat kuat
0,600 – 0,799	Kuat
0,400 – 0,599	Cukup kuat
0,200 – 0,399	Lemah
0,000 – 0,199	Sangat Lemah

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **Perkembangan PDRB Sektor Pertanian di Sulawesi Utara**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) 2000 pada dasarnya menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun 2000 sebagai tahun dasar. Perkembangan PDRB ADHK 2000 sektor pertanian untuk

sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor peternakan di Provinsi Sulawesi

Utara dapat dilihat dalam Tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2. PDRB Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan dan Peternakan**

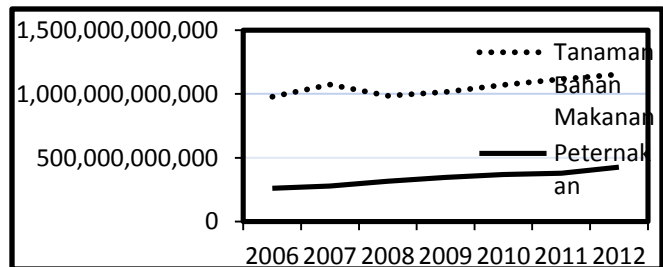
Tahun	Sub Sektor (Rp)		Jumlah
	Tanaman Bahan Makanan	Peternakan	
2006	976.894.280.000	259.917.540.000	1.236.811.820.000
2007	1.073.996.440.000	278.135.980.000	1.352.132.420.000
2008	985.653.510.000	315.560.160.000	1.301.213.670.000
2009	1.014.360.000.000	346.504.000.000	1.360.864.000.000
2010	1.069.570.000.000	368.601.000.000	1.438.171.000.000
2011	1.116.781.000.000	379.856.000.000	1.496.637.000.000
2012	1.153.343.000.000	426.163.000.000	1.579.506.000.000
2013	1.182.826.000.000	432.784.000.000	1.615.610.000.000

Sumber: *Sulut Dalam Angka 2008, 2013 dan 2014. BPS.*

Dapat dilihat dari Tabel tersebut nilai PDRB sub sektor tanaman pangan menurun pada tahun 2008 juga tahun 2011, salah satu penyebabnya yaitu masih terdapat ketergantungan yang tinggi para petani terhadap bantuan pemerintah sehingga bila bantuan pemerintah berkurang, maka hasil produksi pertanian, khususnya tanaman bahan makanan akan menurun. Tetapi sub sektor tanaman bahan makanan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar pada total PDRB sektor pertanian di provinsi Sulawesi Utara. Sub sektor tanaman bahan makanan berada dibawah sub sektor perkebunan yang menjadi penyumbang pertama. Sedangkan Sub sektor peternakan meningkat dari tahun 2006 sampai tahun

2013. Dan sub sektor peternakan menempati posisi ke empat dalam kontribusinya pada total PDRB sektor pertanian (BPS Sulut, 2013c).

Gambar berikut menunjukkan perbandingan PDRB sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor peternakan di Sulawesi Utara.



Sumber : *Diolah dari Tabel 2*

**Gambar 3. Grafik PDRB Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan dan Sub Sektor Peternakan di Sulawesi Utara Tahun 2006 - 2012**

### Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pertanian

Dalam rangka pencapaian target-target utama program pembangunan pertanian dan peternakan tahun 2006-2013 maka perlu mendapatkan dukungan pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah yakni APBN dan APBD. Seperti yang telah diketahui pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian membutuhkan selisih

waktu (*time lag*) selama satu tahun karena dampak sebuah kebijakan ekonomi seperti kebijakan pemerintah biasanya tidak secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi, maka pengeluaran pemerintah selang tahun 2005-2012 akan berpengaruh pada PDRB sektor pertanian tahun 2006-2013. Dapat dilihat dalam Tabel 3 Realisasi Dana APBN dan APBD tahun 2005- 2012.

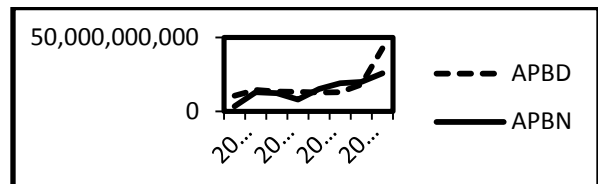
**Tabel 3. Realisasi Dana APBD dan APBN Tahun 2005-2012**

Tahun	APBD (Rp)	APBN (Rp)	Jumlah (Rp)
2005	3.397.487.875	11.463.486.000	14.860.973.875
2006	14.386.183.084	13.006.100.150	27.392.283.234
2007	13.418.246.631	12.356.528.035	25.774.774.666
2008	13.158.192.777	8.016.770.170	21.174.962.947
2009	12.697.706.898	15.098.732.222	27.796.439.120
2010	12.913.880.000	18.904.283.754	31.818.163.754
2011	18.075.278.000	19.941.874.051	38.017.152.051
2012	42.448.494.000	25.750.000.000	68.198.494.000

Sumber : Laporan Tahunan 2005-2012. Diolah.

Dana APBD yang telah terealisasi pada tahun 2006 meningkat sebesar Rp 14.4 Miliar yang pada tahun sebelumnya hanya Rp 10.6 Miliar, menurun sampai tahun 2009 (Rp 12.7 Miliar), pada tahun 2010 sampai 2012 meningkat sampai sebesar Rp42,4 Miliar. Sedangkan, untuk dana APBN juga pada tahun 2007-2008 menurun, namun pada tahun 2009 sampai 2012 meningkat sampai sebesar Rp 25.7 Miliar. Secara keseluruhan

mengalami kecenderungan peningkatan baik APBD maupun APBN. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: diolah dari Tabel 5

**Gambar 4. Grafik Perkembangan Dana APBD dan APBN terhadap Sektor Pertanian di Provinsi Sulawesi Utara**



Dalam penelitian ini menggunakan PDRB berdasarkan Harga konstan (ADHK) tahun 2000, maka untuk nilai APBD dan APBN akan dibagi dengan indeks harga konsumen (IHK) yang merupakan indikator inflasi di Indonesia menggunakan tahun dasar 2000.

Jumlah PDRB sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor peternakan serta jumlah pengeluaran pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBN yang telah dibagi dengan IHK dapat dilihat dalam Tabel berikut

**Tabel 4. Jumlah APBD dan APBN (Pengeluaran pemerintah) tahun 2005-2012 dan Jumlah PDRB 2006-2013 (Jutaan Rupiah)**

Tahun	Pengeluaran pemerintah	Tahun	PDRB
2005	34.189	2006	1.236.812
2006	59.907	2007	1.352.132
2007	51.235	2008	1.301.214
2008	49.607	2009	1.360.864
2009	74.605	2010	1.438.171
2010	81.436	2011	1.496.637
2011	93.800	2012	1.579.506
2012	162.012	2013	1.615.610

Sumber: data sekunder diolah 2014.

**Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Sektor Pertanian**

**Analisis Regresi**

Untuk mengetahui hubungan antara variabel penelitian yang digunakan yaitu PDRB sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah dengan model regresi sederhana, model ekonometrika yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i-k} + \mu_i$$

Nilai dari hasil Minitab kemudian dimasukkan kedalam model sehingga persamaanya berubah menjadi :

$$Y = 1195726 + 3.00 X$$

**(51131) (0.6059)**

Dimana Y adalah PDRB sektor pertanian, X adalah Pengeluaran pemerintah dan angka dalam kurung ialah *standar error*.

Jika melihat persamaan tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta ( $\beta_0$ ) sebesar 1195726 menunjukkan nilai PDRB Rp 1.195.726 Juta jika pengeluaran pemerintah adalah nol.
2. Nilai koefisien  $X_i$  atau  $\beta_1$  adalah sebesar 3,00 menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp 1, akan menyebabkan kenaikan PDRB

sebesar Rp 3, dengan asumsi variabel lain konstan.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Dari hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,803 atau 80,3 persen dan koefisien determinasi yang disesuaikan ( $R_{adj}$ ) adalah sebesar 0,771 atau 77,1 persen. Nilai koefisien determinasi sebesar 80,3 persen artinya variabel pengeluaran pemerintah (APBN dan APBD) dapat menjelaskan nilai PDRB sektor pertanian (Tanaman bahan makanan dan peternakan) sebesar 80,3 persen dan sisanya sebesar 19,7 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.

### **Koefisien Korelasi (R)**

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,896 atau 89,6 persen, artinya antara variabel bebas (Pengeluaran pemerintah) dengan variabel tak bebas (PDRB sektor pertanian) memiliki hubungan yang sangat kuat dan searah. Jika pengeluaran pemerintah meningkat maka nilai PDRB sektor pertanian juga akan meningkat.

### **Interpretasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Pertanian**

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,03 persen (selang kepercayaan 99,7 persen).

Peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar Rp 1 akan meningkatkan PDRB sebesar Rp 3 dengan variabel lain dianggap tetap. Gambaran PDRB sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman bahan makanan dan peternakan yang meningkat setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pertanian di Sulawesi Utara dapat dikatakan cukup baik. Upaya pengembangan infrastruktur, sarana prasarana, perlindungan lahan pertanian, penyediaan benih dan bibit unggul baik tanaman bahan makanan maupun ternak yang diharapkan dapat memberikan hasil produksi yang maksimal dan pemasaran hasil produksi yang menguntungkan bagi petani untuk meningkatkan pendapatan petani di Sulawesi Utara.

Salah satu prasarana penting dalam upaya peningkatan produksi adalah ketersediaan air. Diharapkan adanya kesadaran dan kepedulian dari petani pengguna irigasi untuk memelihara dan merehabilitasi jaringan di daerahnya, disamping itu perlu dicari alternatif sumber air yang memungkinkan untuk menambah debit air irigasi. Demikian halnya dengan prasarana Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan produksi yang telah dibangun jumlahnya jauh dibawah kebutuhan. Masih banyak sentra-sentra produksi pertanian yang belum dibangun Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi akibatnya biaya angkutan hasil relatif mahal, juga mengakibatkan terjadinya kerusakan

mekanis pada komoditi hasil pertanian serta menurunkan harga jual produk tersebut.

**Tabel 5. Dukungan Infrastruktur Mendukung Tanaman Pangan 2011 s/d 2014**

Dukungan Infrastruktur	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Rata-rata Kenaikan Per Tahun (%)
Jalan Usaha Tani (JUT) (Km)	31	34	38	41	10.00
Optimasi Lahan (Ha)	670.00	737	811	892	10.00
Jaringan Irigasi Desa (JIDES) (Ha)	2,382	2,620	2,882	3,170	10.00
Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) (Ha)	2,580	2,838	3,122	3,434	10.00

Sumber : Renja 2014. Distanak Sulut

Disamping komoditas tanaman pangan, pada tahun 2011-2014 fokus pengembangan hortikultura masih sama dengan komoditas yang dikembangkan pada periode RPJMD 2005-2010 yaitu cabe, kentang, bawang merah dan tanaman hias. Dipilihnya komoditas cabe karena berdasarkan evaluasi, ternyata penyebab inflasi provinsi Sulawesi Utara tahun 2008 diakibatkan oleh kurangnya produksi/pasokan cabe untuk kebutuhan daerah. Sedangkan obsesi pengembangan kentang yang sudah dimulai lebih dari 5 tahun lalu yaitu menjadikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pusat perbenihan Indonesia Timur. Fokus pengembangan kentang diarahkan pada 3 Kabupaten yang berdekatan yaitu Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Untuk komoditas bawang merah, dukungan pembiayaan untuk pengembangan sudah

dimulai tahun 2010 di Kabupaten Minahasa, sedangkan pengembangan tanaman hias dialokasikan di kota Tomohon dan Kota Manado.

Dukungan perbenihan Tanaman Pangan yang handal sangat penting dalam upaya pencapaian Sulawesi Utara berswasembada beras serta Swasembada Pangan berkelanjutan, demikian halnya dengan terciptanya Sistem Perbibitan ternak yang optimal mampu memberi peran yang signifikan dalam pencapaian program swasembada daging sapi nasional tahun 2014.

**Tabel 6. Realisasi Kebutuhan Benih Padi Tahun 2011 s/d 2014**

Tahun	Luas Tanam (HA)	Kebutuhan Benih Total (KG)	Penyediaan Benih Bermutu	
			(KG)	Persentase Kebutuhan Per tahun
2011	129,538	3,238,450	1,457,303	45%
2012	132,367	3,309,175	1,654,588	50%
2013	135,271	3,381,775	1,859,976	55%
2014	138,252	3,456,300	2,073,780	60%

Sumber :Renja 2014. Distanak Sulut

Untuk mendukung ketersediaan benih bersertifikat kelas benih sebar seperti pada Tabel 8 di atas, maka perlu direncanakan perbanyak benih sumber kelas benih dasar dan kelas benih pokok. Perbanyak benih sumber kelas benih dasar dilaksanakan di Instalasi Kebun Benih Padi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, sedangkan perbanyak benih pokok dapat dilaksanakan di Instalasi Kebun Benih Padi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi atau di Balai Benih Kabupaten/Kota ataupun oleh penangkar yang sudah maju.

Sejak awal tahun 2007 telah dibentuk UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mempunyai tugas dan fungsi memproduksi benih sumber Tanaman Pangan dan Hortikultura. Berdasarkan hirarki, Balai Benih Provinsi, hanya memperbanyak benih, kelas benih dasar dan/atau benih pokok, selanjutnya benih pokok diperbanyak di Balai Benih Kabupaten/Kota, dan hasil dari perbanyak

di Balai Benih Kabupaten/Kota selanjutnya benih pokok diperbanyak ditingkat penangkar menjadi benih sebar. Namun demikian alur benih tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan jumlah dan kualitas benih tidak tersedia sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk sistem perbibitan ternak sampai sekarang ini belum mampu memberi kontribusi yang signifikan dalam penyediaan bibit ternak, khususnya ternak sapi unggul dalam mendukung program swasembada daging sapi nasional.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sektor pertanian pada sub sektor tanaman bahan makanan dan peternakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor tersebut.

### **Saran**

1. Pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman bahan makanan dan peternakan seharusnya dapat ditingkatkan karena dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk menunjang peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) khususnya sub sektor tanaman bahan makanan dan peternakan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar dapat terlaksana tepat sasaran dan merata, diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia,L. 2007, *Ekonomi Pembangunan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- BPS Sulut, 2008. *Sulut Dalam Angka 2008*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2013a. *Sulut Dalam Angka 2013*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2013b. *Indeks Harga Konsumen 2005-2013*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2013c. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sulawesi Utara*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2014. *Sulut Dalam Angka 2014*. Manado
- Bank Indonesia, 2007. *Produk Domestik Regional Bruto*.
- Distanak Sulut. 2005. *Laporan Tahunan APBN dan APBD*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2006. *Laporan Tahunan APBN dan APBD*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2007. *Laporan Tahunan APBN dan APBD*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2008. *Laporan Tahunan APBN dan APBD*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2009. *Laporan Tahunan APBN dan APBD*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2010. *Laporan Tahunan APBN dan APB*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2011. *Laporan Tahunan APBN dan APBD*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2012. *Laporan Bulan Desember APBN dan APBD*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2013. *Rencana Strategis Tahun 2010-2015*. Manado
- \_\_\_\_\_, 2014. *Rencana Kerja Tahun 2014*. Manado
- Gujarati,D. 2000. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga. Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Erlangga. Jakarta
- Hamongan,L. 2009. *Prospek Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Karo*. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Kekenusa,J. 2002. *Statistika Penerapan Program Minitab*. Universitas Sam Ratulangi. Manado

- Kementrian Pertanian. 2011. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014*.
- Manalu, M. 2008. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan* Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan
- Peraturan Pemerintah Dalam negeri No. 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prasetya, F. 2012. *Teori Pengeluaran Pemerintah*. Modul Ekonomi Publik Universitas Brawijaya. Malang
- Ramadhani, T. 2014. *Dampak Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Sektor Pertanian Terhadap Output, Pendapatan Rumah Tangga dan Kesempatan Kerja*. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang
- Satria. 2013. *Pembangunan Sektor Pertanian Makalah Ekonomi Perencanaan*. Institut Agama Islam Negeri. Padang
- Santoso, P., dan Rahayu, R. 2005. *Analisis pendapatan asli daerah (pad) dan faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam upaya Pelaksanaan otonomi daerah Di kabupaten Kediri*. Jurnal Dinamika Pembangunan. Kediri
- Sukirno, S. 2007. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana. Jakarta
- Suwandi. 2014. *Revolusi Hijau Lestari Paradigma Baru Kedaulatan Pangan, Ramah Lingkungan dan Kesejahteraan Petani*. Lumintu. Jakarta
- Suwanti. 2013. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk sektor pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010*. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Turang, C. 2009. *Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Sulawesi Utara*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Yulianita, A. 2009. *Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang
- Walpole, R. 1995. *Pengantar Statistika*. Gramedia. Jakarta.